

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan jenis kelamin pria dan wanita untuk hidup berpasangan. Hidup berpasangan itu diwujudkan di dalam bentuk perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah. Kebutuhan lahiriah dan batiniah yang diwujudkan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan pengertian perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 UU No 1 tahun 1974. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat religius dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan adat dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menerangkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tersirat di dalamnya bahwa perkawinan dilakukan dengan maksud untuk mencapai kebahagiaan diantara suami istri dan berkomitmen untuk saling menjaga ikatan perkawinan tersebut agar kekal hingga akhir hayat. Ikatan perkawinan dibangun dengan dasar persetujuan diantara seorang pria dan seorang wanita untuk melakukan hak dan kewajiban . Suami istri perlu saling membantu juga melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Berdasarkan pemaparan di atas, secara ideal sebuah perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah rumah yang bahagia. Kebahagiaan ini merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh seluruh anggota keluarga di dalamnya. Baik dari pihak laki-laki sebagai suami, perempuan sebagai istri, dan anak-anak yang menjadi bagian di dalam rumah tangga tersebut.

Sebuah kenyataan yang terjadi saat ini, tujuan perkawinan dalam sebuah rumah tangga seperti yang telah digambarkan di atas tidaklah dapat dirasakan oleh semua orang dalam sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga, yang selanjutnya disebut dengan KDRT menjadi salah satu masalah utama yang mewarnai kehidupann rumah tangga di Indonesia. Rata-rata korban dalam KDRT adalah perempuan.

Menurut Muladi kekerasan terhadap perempuan (KDRT) merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan

berpartisipasi, mengganggu kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya.¹

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menjelaskan pula bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

KDRT memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri, orang tua dan anak atau antara anak dengan anak atau dengan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga yang tinggal menetap. KDRT yang terjadi antara suami isteri dilandasi oleh hubungan dalam lembaga perkawinan yang diatur pula oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan pelaku dan korban yang demikian ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai bagian dari hukum privat sehingga penyelesaian kasus ini lebih sering diarahkan untuk damai atau diselesaikan secara internal keluarga.

Sebagai upaya memberantas KDRT, telah dilahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut dengan UU PKDRT. Lahirnya UU PKDRT ini

¹ Muladi. 2002. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta. The Habibie Center. Hal. 40.

merupakan tindak lanjut dari proses ratifikasi konvensi internasional tentang perempuan dimana Indonesia menjadi anggota di dalamnya. Konvensi internasional yang dimaksud tersebut ialah CEDAW (*Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women*) atau Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Lahirnya UU PKDRT secara lebih spesifik mengatur mengenai diskriminasi terhadap perempuan dalam hubungannya dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²

Definisi di atas memperlihatkan untuk siapa dan mengapa undang-undang ini dibuat, yakni untuk semua anggota rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun penyebutan kata “terutama terhadap perempuan” menunjukkan bahwa gagasan pembuatan undang-undang ini tidak terlepas dari realitas sosiologis dimana KDRT lebih banyak dialami perempuan daripada laki-laki. Karena memang tidak dapat dipungkiri secara fisik, perempuan memiliki kondisi yang lebih lemah daripada laki-laki. Namun tidak jarang pula terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang tidak hanya dialami oleh perempuan namun juga dialami oleh laki-laki.

² Pasal 1, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

Secara lebih khusus, tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT adalah sebagai berikut:

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.³

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari PKDRT sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU PKDRT di atas, undang-undang ini mengatur mengenai larangan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tertuang dalam Pasal 5 UU PKDRT yang meliputi beberapa bentuk tindak kekerasan, sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.⁴

Sementara itu, mengenai sanksi pelanggaran dalam relevansinya dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UU PKDRT dalam hal kekerasan fisik telah diatur dalam Pasal 44 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000”⁵

Sedangkan mengenai kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU PKDRT, sebagai berikut:

³ *Ibid*, Pasal 4.

⁴ *Ibid*, Pasal 5.

⁵ *Ibid*, Pasal 44.

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).⁶

Mengenai sanksi atas bentuk kekerasan seksual, diatur dalam Pasal 47 UU PKDRT, sebagai berikut:

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).⁷

Dalam hal penelantaran rumah tangga, sanksi planggarannya diatur dalam Pasal 49 UU PKDRT dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15. 000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁸

Dengan dikriminalisasikannya KDRT sebagai tindak pidana, maka UU No.23/2004 tentang PKDRT telah menjadi bagian dari sistem hukum pidana Indonesia. Aspek pembedaan di dalam UU PKDRT pada prinsipnya merupakan bentuk perlindungan bagi korban KDRT, sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tindakan serupa tidak terulang lagi di kemudian hari. Arti terpenting dari adanya hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara terletak pada tujuan hukum pidana

⁶ *Ibid*, Pasal 45.

⁷ *Ibid*, Pasal 46.

⁸ *Ibid*, Pasal 49.

itu sendiri, yakni menciptakan tata tertib di dalam masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung dengan damai dan tenteram.

Lahirnya UU No.23 tahun 2004 tentang PKDRT yang di dalamnya juga telah mencantumkan pasal-pasal pemidanaan bagi pelaku yang terbukti melakukan KDRT ternyata tidak dapat berjalan dengan mulus dalam memberantas tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana telah penulis jelaskan di awal, bahwa KDRT masih marak terjadi bahkan mencapai ribuan kasus dengan rata-rata korbannya adalah perempuan.

Pada dasarnya Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana merupakan cara terakhir yang dapat diterapkan (*ultimum remidium*). Artinya penjara bukanlah satu-satunya solusi terbaik dalam menyelesaikan tindak kejahatan, khususnya tindak kejahatan dengan “kerusakan” yang ditimbulkannya masih bisa di restorasi, sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan, walaupun para praktisi dan ahli hukum berpandangan bahwa ADR (*Alternatif Dispute Resolution*) hanya dapat diterapkan dalam perkara perdata, bukan untuk menyelesaikan perkara pidana karena pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan.

Salah satu upaya penyelesaian non litigasi dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah mediasi. Tercatat pada data

kepolisian Polres Malang yang disampaikan oleh Erlehana br maha, anggota sat reskrim Polres Malang, bahwa pada tahun 2015 terdapat 51 kasus yang berhasil dimediasi 29. Kemudian untuk tahun 2016 dari 73 kasus, yang berhasil dimediasi adalah 32. Dan data yang terakhir 2017 per bulan Juli ada 20 kasus yang berhasil mediasi hanyalah 6 kasus saja.

Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi tidak dapat dilepaskan dari cita hukum yang didasarkan pada landasan filsafat hukum yaitu keadilan (*law is justice*), dan asas hukum proses penyelesaian perkara yang mengacu pada sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Perumusan kaidah hukum untuk penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui mediasi yang diderivasi dari cita hukum dan asas hukum. Oleh karena itu pola mediasi yang diterapkan harus mengacu pada nilai-nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Sedangkan norma hukum yang diterapkan harus mempertimbangkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Anggota Polri secara umum sering mendengar penyebutan istilah *restorative justice*, tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anggota yang belum paham dengan istilah tersebut, apalagi menerapkannya. Karena konsep tersebut relatif baru dalam penegakan hukum pidana. Terlebih lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri (selanjutnya disebut UU Polri) hanya mengenalkan konsep “diskresi kepolisian”⁹.

KDRT merupakan jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah, pelaku dan korban adalah anggota keluarga serta sering kali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang

⁹ R. Abdussalam. 2006. *Hukum Pidana Prospek Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat*. Jakarta: Restu Agung. hal. 25-26.

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) memberikan landasan hukum yang kuat yang menjadikan KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan Negara. Untuk itu, muncul pemikiran menggunakan mediasi dengan mengupayakan penyelesaian yang *win-win solution* serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan dalam sistem peradilan pidana.

Data keberhasilan penyidik dalam upaya mediasi yang telah penulis paparkan sebelumnya menggambarkan bahwa upaya mediasi yang dilakukan penyidik mengalami penurunan atau sekaligus memberikan gambaran bahwa perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk mediasi masih sangat lemah. Perlindungan yang penulis maksud di sini ialah perlindungan hukum bagi korban KDRT baik secara preventif maupun represif.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku KDRT, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Atas dasar dari latar belakang masalah yang telah penulis gambarkan tersebut, penulis berpandangan bahwa perlu adanya pengkajian secara kritis dan lebih komperhensif mengenai konsistensi tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 4 UU No.23/2004) dalam kaitannya

dengan perlindungan korban KDRT. Untuk itu, dalam penulisan hukum ini penulis memilih judul: **“Kinerja Kepolisian Dalam Proses Mediasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Guna Memelihara Keutuhan Rumah Tangga Yang Harmonis Dan Sejahtera (Sub Pasal 4 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus di Polres Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yakni

1. Bagaimanakah kinerja kepolisian dalam proses mediasi korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga guna memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dalam proses mediasi korban dan pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Sejauh mana keberhasilan mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana KDRT oleh penyidik di Polres Malang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus kajian pada rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui implementasi pasal 4 UU PKDRT terhadap kinerja aparat pelaksana hukum yaitu kepolisian dalam proses mediasi korban dan pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
2. Mengetahui prosedur mediasi antara korban dan pelaku tindak pidana KDRT oleh penyidik di Polres Malang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yakni mengenai implementasi pasal 4 UU PKDRT terhadap kinerja aparat pelaksana hukum yaitu kepolisian dalam proses mediasi korban dan pelaku tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan tinjauan yuridis UU KDRT terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan hukum ini, penulis memilih jenis penelitian Yuridis empiris, dimana dilakukan penelitian terhadap implementasi hukum yakni UU PKDRT tepatnya pada pasal 4 tentang tujuan daripada penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dimana penelitian ini membahas bagaimana hukum tersebut beroperasi dalam proses aparat pelaksana hukum melakukan mediasi terhadap pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Alasan pemilihan lokasi

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Polres Malang. Hal ini dikarenakan banyak perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diadukan di lokasi tersebut, selain itu penulis ingin melihat kinerja para aparat penegak hukum yakni pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya terkait dengan permasalahan yang telah diangkat penulis yakni mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

3. Jenis data

a. Data primer

Sumber data primer adalah jenis data primer yang didapatkan langsung dari Kepolisian mengenai jumlah angka keberhasilan mediasi dari tahun 2015 sampai 2017, didapat melalui proses

observasi dan/atau interview/wawancara pada tempat yang diteliti. Data utama yang diperoleh secara langsung dengan meminta data dan melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum di Polres Malang.

b. Data sekunder

1. Kepustakaan

Merupakan pengkajian informasi tertulis mengenai upaya mediasi terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga oleh kepolisian yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan. Kepustakaan yang dimaksud dalam penulisan ini adalah berupa buku-buku ilmu hukum, artikel hukum, karya ilmu hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, dan secara lebih khusus mengenai konsistensi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif perlindungan korban.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen yang dimaksud di sini adalah studi dokumen mengenai data kepolisian yang menunjukkan kinerja aparat penegak hukum dalam upaya mediasi pada tindak pidana KDRT dan berbagai aturan atau undang-undang yang dijadikan landasan untuk melakukan analisa atas studi kasus yang diteliti, yang dalam penyajiannya akan dicantumkan di dalam penulisan hukum yang dibuat, dan akan dilampirkan di bagian

lampiran pada penulisan hukum yang ditulis oleh peneliti.

3. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Studi dokumentasi

Yaitu pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang terkait, yakni catatan laporan korban KDRT per tahun, kemudian data tentang penyelesaian tindak pidana KDRT melalui mediasi beserta angka keberhasilannya. dan ditambah dengan penelusuran perundang-undangan dalam hal berkenaan dengan proses penelitian ini.

b. Wawancara

Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui tanya jawab, dialog atau diskusi dengan salah satu anggota sat reskrim polres malang yakni Ibu Erlehana br maha, pangkat Briпка, dengan Nrp. 80010709 tentang prosedur mediasi dan kendala apa yang sering terjadi dalam proses penyelesaian KDRT tersebut.

c. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap tata cara pihak penyidik dalam hal menyelesaikan perkara KDRT dengan upaya non litigasi, yakni dalam proses mediasi korban dan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

4. Teknik analisa data

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendapat dari penulis kemudian disajikan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan penelitian hukum berkaitan dengan tingkat keberhasilan penyidik untuk memediasi korban beserta pelaku tindak pidana KDRT untuk dapat mengetahui sejauh mana UU KDRT tepatnya pada pasal 4 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dapat memenuhi hak perlindungan bagi korban.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini akan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana akan dibagi menjadi sub bab didalam bab tersebut. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. Di dalam sub bab metode penelitian akan diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang dipilih penulis, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum serta analisa bahan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai uraian tentang doktrin, pendapat pakar, kajian yuridis serta bahan-bahan kerangka teori landasan yuridis dan landasan konseptual yang akan dipakai penulis untuk mendukung analisa terhadap permasalahan yang akan diteliti. Bagian pertama memaparkan mengenai tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga. Bagian kedua mengenai latar belakang tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bagian ketiga mengenai latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT) sebagai instrumen penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya diulas mengenai tinjauan umum konsep perlindungan hukum dalam hukum pidana. Bagian terakhir bab ini mengulas mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas permasalahan yang akan diteliti yang akan disertai dengan analisa isi terkait dengan konsistensi tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif perlindungan hukum bagi korban.

BAB IV : PENUTUP

Menguraikan mengenai simpulan atas perumusan masalah yang diteliti dan uraian penulis mengenai saran yang ingin disampaikan berdasarkan jawaban yang diuraikan dalam simpulan.

